

POTRET PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM INOVASI PENDIDIKAN DASAR DI INDONESIA ABAD XXI

Laurens Kaluge
Universitas Kanjuruhan Malang
laurens@unikama.ac.id

ABSTRAK. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu komponen penting dalam praktek pendidikan yang telah dilaksanakan dalam banyak proyek pendidikan dasar di Indonesia. Penelitian ini mencoba memetakan bukti untuk menjawab bagaimana gambaran partisipasi masyarakat di sekolah-sekolah yang pernah mengalami program inovasi pendidikan ditinjau dari segi proyek dan jenjang pendidikan. Penelitian ini berupa survey di tujuh provinsi. Sampel diambil dari delapan kabupaten dan tujuh kota, terdiri atas 2415 guru dan 1785 orangtua/anggota masyarakat. Data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner dan *focus group discussion*. Analisis deskriptif mengungkapkan bahwa praktek baik untuk partisipasi masyarakat meliputi intensitas keterlibatan masyarakat, kebutuhan masyarakat, kepuasan masyarakat, sistem komunikasi, dan kemitraan antara sekolah dan masyarakat. Kadar partisipasi setiap komponen bervariasi antara kesembilan proyek dan kedua jenjang pendidikan dasar. Selama ini selalu terjadi pembaharuan dalam pendidikan, komponen-komponen tersebut tak pernah luntur, dan temuan-temuan ini patut menjadi pelajaran yang dipetik demi masa depan kebaikan pendidikan .

Kata Kunci: *partisipasi masyarakat; pendidikan dasar; inovasi pendidikan; program arus-utama*

PENDAHULUAN

Sekolah berada di tengah-tengah masyarakat dan dapat dikatakan berfungsi sebagai pisau bermata dua. Pertama, adalah menjaga kelestarian nilai-nilai positif yang ada dalam masyarakat, agar pewarisan nilai-nilai masyarakat itu berlangsung dengan baik (Bundu, 2009). Kedua, adalah sebagai lembaga yang dapat mengubah nilai dan tradisi itu sesuai dengan kemajuan dan tuntutan kehidupan serta pembangunan (Epstein, 2009). Kedua fungsi ini seolah-olah bertentangan, namun sebenarnya keduanya dilakukan dalam waktu bersamaan. Nilai-nilai yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan tetap dijaga lestari, sedangkan yang tidak sesuai harus diubah. Pelaksana fungsi sekolah ini menjadi tumpuan harapan masyarakat untuk kemajuan mereka. Untuk dapat menjalankan fungsi tersebut hubungan sekolah masyarakat diupayakan selalu baik (Dreikurs, 1970). Dengan demikian terdapat kerja sama serta situasi saling membantu antara sekolah dan masyarakat. Di samping itu pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara sekolah, pemerintah, dan masyarakat.

Terdapat banyak bukti yang menegaskan bahwa praktek baik (*good practices*) berada dimana-mana. Sebagaimana diketahui, ada sekelompok *good practices* yang sudah atau sedang dikembangkan oleh berbagai proyek, termasuk yang didanai oleh donor di Kementerian Pendidikan Nasional dan Kebudayaan. Pada tingkat sekolah, gagasan partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan penyelenggaraan pendidikan, bisa merupakan kearifan dan keunggulan lokal (ADB 2001, ADB 2004, World Bank, 2000).

Sejak awal abad XXI ada sekurang-kurangnya sembilan program pendidikan dasar yang aktif beroperasi di Indonesia. Kesembilan program ini boleh dikatakan program arus-utama (*mainstream*) inovasi bagi sejumlah program susulan berskala besar maupun kecil. Program-program itu dikenal dengan nama uniknya yaitu:

- *Managing Basic Education* (MBE), Mengelola Pendidikan Dasar dengan dana USAID (RTI-USAID, 2004).
- *Study on Regional Educational Development and Improvement Program in Republic of Indonesia*, JICA (REDIP-JICA), Studi tentang Program Pengembangan dan Peningkatan Pendidikan Daerah didanai oleh JICA (MONE-JICA, 2004).

- *Study on Regional Educational Development and Improvement Program in Republic of Indonesia (REDIP-G)*, Studi tentang Pengembangan dan Peningkatan Program Pendidikan Daerah di Republik Indonesia (MONE-JICA, 2004).
- *Decentralized Basic Education Project (DBEP)*, Proyek Pendidikan Dasar Terdesentralisasi dengan dana ADB (Muljoatmodjo, 2004).
- *Creating Learning Community for Children (CLCC)*, kerja sama UNESCO-UNICEF-Pemerintah Indonesia (UNICEF-UNESCO, 2000).
- *Basic Education Project (BEP)*, Proyek Pendidikan Dasar dengan dana Bank Dunia (Muljoatmodjo, 2004).
- *Nusa Tenggara Timur Primary Education Partnership (NTT-PEP)*, Kemitraan Pendidikan Dasar di Nusa Tenggara Timur – Hibah AusAid (Muljoatmodjo, 2004).
- *Science Education Quality Improvement Project (SEQIP)*, Proyek Peningkatan Mutu Pendidikan IPA dengan dukungan dana GTZ-KfW (Bergmann & Whewell, 2001).
- *Contextual Teaching and Learning Program (CTL)*, Program Belajar-Mengajar Kontekstual, program yang disponsori oleh Direktorat Pengembangan Sekolah Menengah Pertama, Depdiknas (Muljoatmodjo, 2004).

Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan

Berkenaan dengan keterlibatan masyarakat, hasil kajian dokumen menggambarkan bahwa ada tiga hal yang perlu diberikan penekanan. Pertama, secara umum semua program atau proyek mengembangkan komponen partisipasi masyarakat. Pada dasarnya, partisipasi masyarakat selalu terintegrasi dalam setiap elemen program (Anam, 2006). Kedua, beberapa program secara eksplisit menyebutkan partisipasi masyarakat dalam program, contohnya dalam MBE, REDIP JICA dan REDIP-G, DBEP, CLCC, BEP, dan NTT PEP (Muljoatmodjo, 2004). Sedangkan dalam program-program SEQIP dan CTL, keterlibatan masyarakat dimasukkan dalam pengembangan proses belajar dan tidak secara khusus dikembangkan melalui pelatihan. Ketiga, bentuk-bentuk partisipasi masyarakat pada setiap program tidak selalu sama (Anam, 2006). Kesamaan-kesamaan yang diperoleh dari dokumen yang adalah:

- Pembentukan dan pengoperasian Komite Sekolah
- Pembentukan Tim Pelaksana Sekolah (Satuan Tugas)
- Partisipasi masyarakat dalam Rencana dan Anggaran Pengembangan Sekolah
- Partisipasi masyarakat dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan sekolah
- Partisipasi masyarakat dalam monitoring kinerja sekolah, yang ditunjukkan dalam:
 - Workshop untuk mengembangkan monitoring masyarakat
 - Pertemuan reguler untuk merancang jadwal kegiatan dan monitoring
 - Monitoring dan evaluasi yang sedang berjalan pada program yang ada
 - Monitor sekolah dan masyarakat
 - Sistem akuntabilitas publik

Perbedaan antar program ketika berbicara tentang partisipasi masyarakat secara konkrit tampak dengan adanya:

- Dukungan khusus masyarakat kepada sekolah melalui lembaga khusus seperti Tim Pengembangan Pendidikan Kecamatan (TPPK) baik dalam REDIP JICA maupun REDIP-G.
- Kepemilikan sejati akan pendidikan dan peningkatan mutunya baik pada REDIP JICA maupun REDIP-G.
- Keterlibatan semua jenis sekolah menengah pertama di kecamatan terpilih dalam kegiatan-kegiatan program/proyek baik REDIP JICA maupun REDIP-G.
- Pendekatan yang sinergi oleh sekolah dan TPPK dalam mencapai tujuan yang sama melalui program-program berbeda yang dilaksanakan oleh pihak masing-masing (sekolah dan TPPK) dilaksanakan dalam REDIP JICA dan REDIP G.
- Masyarakat mendukung pengembangan anak-anak mereka melalui interaksi langsung dalam proses belajar-mengajar, seperti MBE, CLCC dan NTT PEP
- Meningkatnya kesadaran masyarakat
- Melindungi hak-hak anak dalam CLCC dan NTT PEP

- Memfokuskan belajar-mengajar pada Kesehatan dan Gizi bagi sekolah dasar kelas rendah dalam NTT PEP

Strategi Pengembangan Partisipasi Masyarakat

Pengembangan kapasitas untuk melibatkan masyarakat dari tingkat nasional hingga tingkat sekolah diulas sebagai berikut. Pada tingkat nasional, MBE dan CLCC mempunyai kesamaan dalam hal penyiapan para pelatih untuk tingkat yang lebih rendah (tingkat kabupaten pada MBE, dan tingkat provinsi pada CLCC). Keduanya mencakup isi dan durasi yang sama, yaitu enam hari untuk partisipasi masyarakat-manajemen berbasis masyarakat-PAKEM. Baik menggunakan pelatih ahli nasional maupun fasilitator, MBE melatih peserta-peserta dari kabupaten. Sedangkan CLCC melatih guru, kepala sekolah, pengawas dan pejabat pendidikan dari masing-masing kabupaten dan provinsi.

Tingkat provinsi tidak berpengaruh banyak terhadap praktek-praktek pendidikan pada jenjang yang lebih rendah karena peraturan desentralisasi atau otonomi kabupaten. CLCC dan BEP dimulai pada era sentralistik di negeri ini. Oleh karena itu dalam proyek MBE and NTT-PEP, pengembangan kapasitas pada tingkat kabupaten akan berharga daripada di tingkat provinsi. Pada CLCC, pelatihan masih konsisten mulai dari tingkat nasional ke provinsi dan kabupaten berkenaan dengan tujuan, isi, durasi, pelatih, peserta, dan metodenya. Sedangkan BEP, yang secara khusus merehabilitasi bagian-bagian fisik sekolah, menyelenggarakan pembangunan kapasitas pada tingkat provinsi yang kemudian turun ke tingkat yang lebih rendah. Partisipasi masyarakat dalam BEP berkaitan dengan penentuan kriteria seleksi sekolah yang eligibel, dan membentuk kemitraan masyarakat untuk rehabilitasi sekolah.

Di tingkat kabupaten, mulai tampak sejumlah keunikan dalam hal tujuan dan penekanan pelatihan. MBE memberikan perhatian kepada rencana dana anggaran pengembangan sekolah, CLCC berfokus kepada TOT (training of trainers) pada gugus sekolah, BEP pada partisipasi komite sekolah dan masyarakat dalam perencanaan dan monitoring kegiatan-kegiatan pengembangan sekolah, dan NTT-PEP pada kerja sama antara sekolah dan masyarakat sambil menggunakan standar pelayanan minimal (SPM) untuk menyiapkan rencana-rencana sekolah. Konsekuensinya, tujuan dan isi pengembangan kapasitas itu sendiri beragam di antara proyek-proyek:

- MBE pada pembuatan draf rencana dan anggaran sekolah
- CLCC pada kapabilitas dan kompetensi pelatih
- BEP pada regulasi, kemitraan, pengetahuan dan keterampilan dalam pengembangan sekolah
- NTT-PEP pada SPM dengan mengenalkan manajemen berbasis sekolah dan komite sekolah yang transparan dan inklusif.

Pelatihan dilaksanakan 3 hari dalam MBE, 5 hari dalam BEP, 6 hari dalam CLCC dan NTT-PEP. Durasi waktu mencerminkan seberapa luas dan dalam isinya diejewantahkan ke dalam kegiatan-kegiatan proyek masing-masing. MBE paling efisien dalam menggunakan waktu tapi proyek lainnya cenderung lebih lama guna meyakinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam urusan pendidikan. Mungkin MBE mempunyai rumus sendiri untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat tanpa kehilangan poin utama dari tujuan yang berkaitan dengan kondisi-kondisi setempat. Para pelatih dan peserta pada tingkat kabupaten juga beragam di antara MBE, CLCC, BEP dan NTT-PEP. Keragamannya ditunjukkan sebagai berikut:

- Pelatih-pelatih MBE pada tingkat kabupaten adalah koordinator kabupaten dan fasilitator kabupaten yang didukung oleh pelatih-pelatih nasional. Peserta-peserta latihan (yang dilatih) adalah kepala sekolah, guru, dan pengawas.
- Pelatih CLCC adalah yang telah lulus TOT pada tingkat provinsi sedangkan partisipannya adalah guru-guru.
- Dalam BEP, pelatihnya adalah asisten teknis dari Jakarta, pakar manajemen pendidikan dari kabupaten, manajer kabupaten, kepala dinas pendidikan kabupaten, ketua dewan pendidikan kabupaten, ketua tim MBS kecamatan, dan sekretaris unit fasilitasi kabupaten.

- Dalam NTT-PEP, pelatihnya adalah advisor MBS internasional, advisor MBS lokal, dan advisor jender. Para pesertanya adalah anggota-anggota komite sekolah, orang tua, dan tokoh-tokoh masyarakat.

Metode-metode yang digunakan dalam pelatihan adalah ceramah, diskusi kelompok (termasuk diskusi kelompok fokus), simulasi, pencontohan (modeling), pendekatan partisipatif.

Pada tingkat gugus sekolah, BEP memberikan perhatian khusus. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pengetahuan tim rehabilitasi sekolah dalam merencanakan dan mengelola dana hibah rehabilitasi sekolah serta menyediakan bantuan teknis kepada koordinator lapangan dalam mengarahkan pekerjaan fisik. Isinya adalah: kriteria seleksi sekolah yang memenuhi syarat, peraturan untuk melaksanakan rehabilitasi sekolah melalui kemitraan sekolah-masyarakat, uraian pekerjaan Tim Rehabilitasi Sekolah dan konsultan lapangan, peran masyarakat dalam rehabilitasi dan pemeliharaan, para pelatihnya adalah konsultan-konsultan nasional (manajemen keuangan, pengadaan, konstruksi). Mereka melatih petugas Proyek Provinsi dan petugas Proyek Kabupaten dan unit-unit terkait melalui ceramah dan diskusi partisipatif.

Untuk tingkat sekolah, CLCC memiliki pengembangan kapasitas khusus. Tujuannya ialah menyediakan bantuan teknis (pelatihan lanjutan) kepada guru-guru di sekolah. Pelatih-pelatih tingkat provinsi dan kabupaten melatih guru dalam jam sekolah melalui monitoring praktek mengajar, berdiskusi dan memberikan umpan balik. Hal ini diorganisasi oleh Kantor Dinas Kabupaten dan Cabang Dinas Kecamatan.

METODE PENELITIAN

Tujuan penelitian ini berkaitan dengan Partisipasi Masyarakat, pertanyaan utama yang dikembangkan adalah bagaimana gambaran partisipasi masyarakat di sekolah-sekolah yang pernah mengalami program inovasi pendidikan ditinjau dari segi jenjang pendidikan dan proyek.

Instrumen dan pedoman relevan yang diperlukan untuk studi lanjutan yang dilakukan di lapangan harus mencakup: pedoman wawancara, pedoman FGD untuk melaksanakan diskusi kelompok fokus, kuesioner untuk responden yang dikenal, dan pedoman checklist.

Dipilih sampel 8 kabupaten dan 7 kota dari tujuh provinsi berdasarkan empat kriteria. Pertama, ketersediaan program yang menawarkan good practices dalam kesembilan program yang dibahas pada bagian-bagian sebelumnya di suatu provinsi dan kabupatennya masing-masing. Kedua, jumlah program atau proyek yang ditawarkan di provinsi, kabupaten dan/atau kecamatan tertentu. Ketiga, ketersediaan sekolah dimana good practices, dari kesembilan program itu dilaksanakan. Dan keempat, kesiapan provinsi, kabupaten, kecamatan, dan sekolah untuk dikunjungi.

Provinsi-provinsi yang diputuskan untuk dikunjungi adalah Jawa Tengah (Kota Magelang dan Kabupaten Pekalongan), Jawa Barat (Sukabumi, Bekasi, dan Kota Bogor), Nusa Tenggara Barat (Lombok Tengah dan Kota Mataram), Nusa Tenggara Timur (Kabupaten Ende dan Kota Kupang), Sulawesi Selatan (Kabupaten Bantaeng dan Kota Makassar), Kalimantan Selatan (Kabupaten Barito Kuala dan Kota Banjarmasin), Sumatra Utara (Kabupaten Deli Serdang dan Kota Medan). Dari masing-masing kabupaten/kota dipilih 10-20 sekolah dasar dan sekitar 10 sekolah menengah pertama.

Sampel untuk mengisi kuesioner di 364 sekolah (264 SD dan 116 SMP) keseluruhannya terdiri atas 2415 guru (1435 guru SD dan guru 980 SMP), 1785 orang tua/anggota masyarakat (1289 di SD dan 496 di SMP). Di setiap kabupaten, 80 orang (guru dan orang tua/anggota masyarakat) dilibatkan dalam Diskusi Kelompok Fokus (Focus Group Discussion).

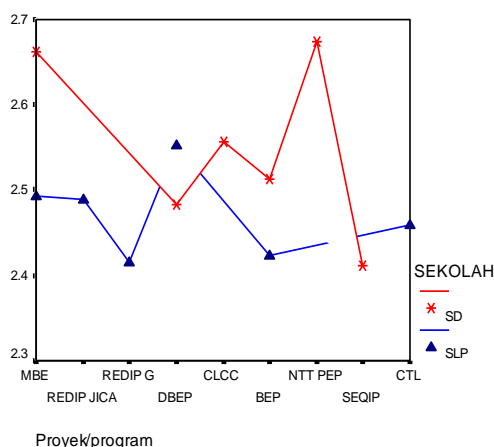
Data kuantitatif yang diperoleh dianalisis secara deskriptif dan disajikan dalam grafik serta didukung dengan data kualitatif. Pada dasarnya perbandingan diantara proyek-proyek sangat bermanfaat guna menjawab pertanyaan penelitian dengan memperhitungkan good practices yang menonjol dari proyek terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lima komponen partisipasi masyarakat, lewat *focus group discussion* (FGD) ditemukan yaitu bentuk dan intensitas keterlibatan masyarakat, kebutuhan masyarakat, kepuasan masyarakat, sistem komunikasi, dan kemitraan antar sekolah-masyarakat. Kelima komponen tersebut dapat diterima sebagai refleksi keterlibatan yang sedang diteliti (Barnett & O'Mahony, 2007; Hoover-Dempsey, Bassler, & Burrow, 1995; Sylva & Siraj-Blatchford, 1995). Masing-masing dipaparkan berdasarkan data isian kuesioner.

Intensitas Keterlibatan Masyarakat

Keterlibatan masyarakat dalam aneka kegiatan sekolah tidak terlepas dari prakarsa sekolah dalam mengundangnya ke berbagai pertemuan. Yang sangat penting dalam pertemuan adalah bagaimana partisipasi guru dan masyarakat diakomodasi oleh kepala sekolah untuk berinteraksi mengajukan pertanyaan, informasi, usulan, penolakan atau pengutaraan ketidaksetujuan. Ilustrasi pada Gambar 1 menunjukkan bahwa tingkat pelibatan oleh kepala sekolah yang paling tinggi di tingkat SD berturut-turut adalah pada proyek MBE, NTT-PEP, dan CLCC. Sedangkan pada jenjang SMP adalah DBEP, MBE, dan REDIP-JICA. Selain komite sekolah, masyarakat/orang tua siswa dilibatkan juga dalam perumusan kebijakan sekolah dan rencana program sekolah.

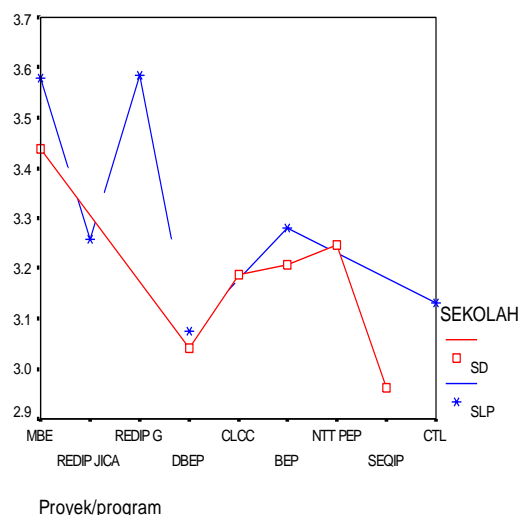


Gambar 1. Intensitas Keterlibatan Masyarakat

Potensi *good practices* berdasarkan karakteristik kabupaten/kota tampak bahwa pada jenjang SD, terjadinya *good practices* pada Kabupaten Bekasi, Bantaeng, dan Ende. Sedangkan pada jenjang SMP adalah Kabupaten Ende, Barito Kuala, dan Bantaeng. Pada beberapa kabupaten/kota terjadi perbedaan keterlibatan masyarakat yang cukup lebar antara jenjang pendidikan, seperti di Kota Kupang, Kabupaten Bekasi, dan Kota Banjarmasin. Dari data tersebut tampaknya telah terjadi imbas dari satu proyek ke proyek lainnya, seperti di Kabupaten Bekasi yang dikembangkan oleh proyek REDIP-G pada jenjang SMP, ternyata pada jenjang SD di potensi *good practices* juga kuat pada sekolah BEP.

Kebutuhan Masyarakat

Potensi *good practices* pada komponen kebutuhan masyarakat muncul pada indikator aspirasi masyarakat terhadap pendidikan, tingkat kerja sama orang tua dalam menunjang upaya pendidikan di sekolah, dan masyarakat mengetahui prestasi belajar anak tanpa harus menanyakan pada sekolah. Gambar 2 menunjukkan tanggapan masyarakat atas aspirasinya terhadap pendidikan dilihat dari jenjang pendidikan. Aspirasi masyarakat yang secara umum muncul pada setiap proyek dengan intensitas bervariasi. Pada jenjang pendidikan tampak bahwa jenjang SMP berespons terhadap kebutuhan masyarakat lebih tinggi dibandingkan jenjang SD. Di jenjang SD yang berpotensi *good practices* mengakomodasi kebutuhan masyarakat yaitu MBE, NTT-PEP, dan BEP; sedangkan pada jenjang SMP adalah REDIP-G, MBE, dan BEP.



Gambar 2. Pemenuhan Aspirasi Masyarakat

Demikian pula jika dilihat berdasarkan karakteristik kabupaten/kota, potensi *good practices* pada komponen kebutuhan masyarakat tampak bervariasi antar daerah sejalan dengan keberadaan proyek di masing-masing kabupaten/kota bersangkutan. Kesenjangan lebar antara SD dan SMP tampak di Kota Mataram, Kota Bogor, Barito Kuala, dan Kabupaten Deli Serdang. Sedangkan di kabupaten/kota lainnya perbedaan kedua jenjang sekolah relatif kecil.

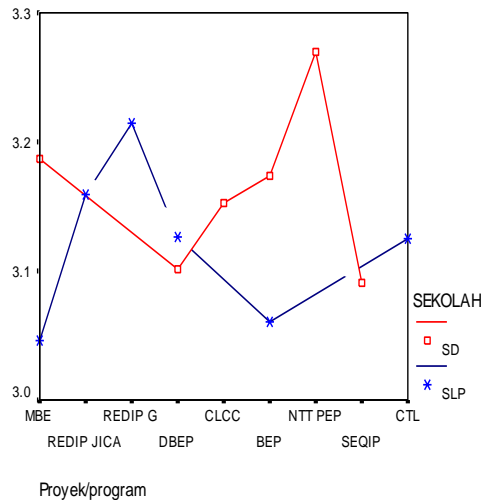
Kepuasan Masyarakat

Pengembangan dan keberlangsungan sekolah sangat bergantung pada kepercayaan dan kepuasan pelanggan, dalam hal ini masyarakat. Kepuasan masyarakat terhadap sekolah dapat dilihat dari beberapa aspek, di antaranya adalah terhadap kinerja sekolah, seperti prestasi belajar siswa dan penyiapan anak-anak menghadapi tuntutan dunia kerja.

Dilihat dari jenjang pendidikan pada Gambar 3, di SD, potensi *good practices* yang kuat untuk komponen kepuasan masyarakat adalah NTT-PEP, MBE, dan BEP. Pada proyek NTT-PEP, pelaporan kemajuan anak-anak secara teratur oleh sekolah merupakan aspek yang paling dibutuhkan dan memuaskan masyarakat.

Sedangkan pada jenjang SMP, proyek yang menonjol baik adalah REDIP-G, REDIP-JICA, dan CLCC. Pada sekolah yang ada di daerah REDIP-G, kepuasan masyarakat terutama pada penyiapan anak-anak menghadapi tuntutan dunia kerja. Hal ini terlihat dari adanya beberapa SMP mengembangkan laboratorium komputer dan jaringan internet, atas bantuan dari Perusahaan Elektronik, LG dan kerja sama dengan PT Telkom.

Kepuasan masyarakat dilihat dari kondisi kabupaten/kota menunjukkan adanya konsistensi antar jenjang pendidikan SD dan SMP dalam satu daerah. Perbedaan yang signifikan lebar terjadi di Kota Kupang dan Kota Banjarmasin. Potensi *good practices* pada jenjang SD di Kota Kupang dikontibusi oleh proyek CLCC dan SEQIP, sedangkan jenjang SMP dikontibusi oleh proyek CTL.



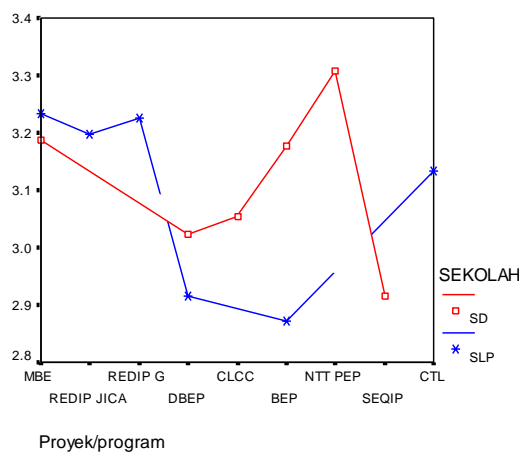
Gambar 3. Kepuasan Masyarakat

Sistem Komunikasi dengan Masyarakat

Potensi *good practices* pada komponen sistem komunikasi yang muncul adalah upaya pengefektifan komunikasi internal di sekolah. Komunikasi demikian berjalan secara akurat, relevan, dan tepat waktu. Demikian pula dengan komunikasi dengan *stakeholder* sekolah berlangsung efektif dan tepat waktu, evaluasi sekolah oleh kepala sekolah, guru, pegawai dan *stakeholder* terlaksana secara tepat, dan masalah sekolah ditangani dengan cepat dan tuntas.

Pada Gambar 4, dilihat dari jenjang pendidikan, pada jenjang SD potensi *good practices* pada komponen sistem komunikasi dengan masyarakat muncul pada proyek NTT-PEP, MBE, dan BEP. Pada NTT-PEP, sistem komunikasi dibangun melalui media radio. Sedangkan pada jenjang SMP muncul pada MBE, REDIP-G, dan REDIP-JICA. Pada proyek MBE, sistem komunikasi dikembangkan melalui berbagai media, seperti Suara MBE, website, dan media komunikasi lainnya.

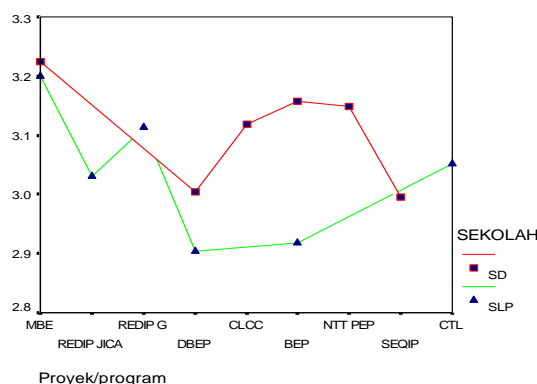
Potensi *good practices* dilihat dari karakteristik daerah, kabupaten/kota, menunjukkan bahwa sistem komunikasi pada tingkat SD rata-rata lebih baik dibandingkan dengan jenjang SMP. Hal ini disebabkan oleh kedekatan orang tua siswa dengan sekolah lebih baik. Bahkan pada proyek CLCC dibangun sebuah asosiasi orang tua siswa sekelas, yang dapat menjembatani kebutuhan belajar siswa dengan orang tua siswa, bahkan kadang-kadang orang tua siswa masuk kelas berperan sebagai narasumber belajar. Dilihat karakteristik daerah, pada jenjang SD potensi *good practices* yang kuat pada kompetensi komunikasi adalah Kabupaten Bekasi, Kabupaten Deli Serdang, dan Kabupaten Pekalongan. Sedangkan pada tingkat SMP adalah Kabupaten Ende, Kabupaten Bantaeng, Kota Bogor, dan Kabupaten Barito Kuala.



Gambar 4. Sistem Komunikasi

Kemitraan

Potensi *good practices* pada komponen kemitraan yang muncul meliputi aspirasi masyarakat terhadap pendidikan, tingkat kerja sama orang tua dalam menunjang upaya pendidikan di sekolah, dan kebiasaan orang tua menolong anaknya mengerjakan pekerjaan rumah. Ditinjau dari jenjang pendidikan, di Gambar 5, pada jenjang SD potensi *good practices* pada komponen kemitraan lebih baik dibandingkan dengan jenjang SMP. Pada jenjang SD, potensi *good practices* paling kuat adalah MBE, BEP, dan NTT-PEP. Sedangkan pada jenjang SMP adalah MBE, REDIP-G, dan REDIP-JICA.



Gambar 5. Kemitraan Sekolah-Masyarakat

Karakteristik kabupaten/kota tidak selalu muncul bersamaan antar jenjang pendidikan, seperti terjadi pada Kabupaten Kupang dan Bekasi, dimana jenjang SD lebih baik dibandingkan daripada jenjang SMP, sedangkan di Kabupaten Banjarmasin potensi *good practices* di jenjang SMP lebih baik dibandingkan jenjang SD. Kabupaten yang konsisten memiliki potensi *good practices* yang sama-sama kuat baik SD maupun SMP adalah Kabupaten Bantaeng. Kesenjangan potensi *good practices* antar jenjang pendidikan cukup besar di Kota Kupang, Kabupaten Bekasi, dan Kota Banjarmasin.

KESIMPULAN

Temuan deskriptif mengungkapkan bahwa dalam semua program dan jenjang pendidikan terjalin partisipasi masyarakat dengan intensitas yang bervariasi. Semua komponen partisipasi masyarakat walau memiliki variasi yang besar, bahkan pada proyek yang desainnya tidak mengembangkan komponen tersebut, tetapi di lapangan komponen tersebut muncul, disebabkan komponen *good practices* tersebut telah menjadi bagian dari pengembangan pendidikan secara keseluruhan. Pada jenjang SD yang kuat adalah NTT-PEP, MBE dan BEP. Kekuatan NTT-PEP meliputi aspek keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan implementasi, kepuasan masyarakat, dan sistem komunikasi dengan masyarakat; kekuatan MBE pada aspek partnership. Sedangkan pada jenjang SMP yang kuat adalah REDIP-G meliputi aspek kebutuhan masyarakat dan kepuasan masyarakat, kekuatan REDIP-JICA pada aspek system komunikasi dengan masyarakat dan partnership, serta DBEP pada keterlibatan masyarakat dalam perencanaan sekolah.

Kapasitas yang mampu menghasilkan suksesnya penerapan *good practices* pada tingkat kabupaten/kota dan sekolah termasuk masyarakat meliputi komitmen semua pihak baik *provider* maupun *stakeholder* pendidikan, ketersediaan berbagai regulasi yang mendukung terjadinya *good practices*, dan ketersediaan sumber daya manusia yang memadai dalam mendukung terjadinya *good practices*.

Komitmen pemerintahan kabupaten/kota, komitmen pemerintahan daerah dapat dilihat dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kabupaten/kota yang menunjukkan hampir semua kabupaten/kota menyatakan bahwa sector pendidikan atau pengembangan sumberdaya manusia termasuk prioritas pembangunan kabupaten/kota. Untuk menjalankan *good practices* diperlukan sumberdaya manusia yang memiliki kapasitas dan kapabilitas yang memadai. Pengembangan kapasitas di tingkat kabupaten/kota masih terbatas,

terutama dalam mengembangkan staf dinas itu sendiri. Pengembangan staf dinas pendidikan kabupaten/kota biasanya berasal dari luar dinas pendidikan kabupaten/kota, seperti dari dinas provinsi atau dari pusat.

DAFTAR PUSTAKA

- ADB. 2001. Project Completion Report on the Junior Secondary Education Project (Loan 1194-INO). ADB PCR: INO 24332. May.
- ADB. 2004. Second Junior Secondary Education Project, Loan 1573/1574-INO: Main Project Completion Report. May.
- Anam, S. 2006. Sekolah Dasar: Pergulatan Mengejar Keteringgalan. Solo: Wajatri.
- Barnett, B. G., & O'Mahony, G.R. 2007. Developing a culture of reflection: implications for school improvement. *Reflective Practice* 7 (4):499-523.
- Bergmann, H., Whewell, E. 2001. Report of SEQIP Project Progress Review 2001. 20-31 August.
- Bundu, P. 2009. Partisipasi masyarakat dalam pendidikan dasar dan menengah. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan* 15 (3):451-468.
- Dreikurs, R. C., M. 1970. Parents and Teachers: Friends or Enemies? *Education* 91 (2):147-154.
- Epstein, J. L. 2009. School, Family, and Community Partnership: Caring for the Children We Share. In *School, Family, and Community Partnership: Your Handbook for Action*, edited by J. L. Epstein, et al. Thousand Oaks, CA: Corwin Press - Sage Company, 1-56.
- Hoover-Dempsey, K. V., Bassler, O.C., & Burow, R. 1995. Parents' reported involvement in students' homework: strategies and practices. *The elementary school journal* 95 (5):435-450.
- MONTE-JICA. 2004. The Study on Regional Educational Development and Improvement Program (Phase 2) in the Republic of Indonesia: Progress Report 4 Summary. February.
- Muljoatmodjo, S. 2004. Task 1 Most Critical and Important Capacity Gaps in Basic Education. Progress Report 1 for UNICEF Jakarta. June. (Unpublished).
- RTI-USAID. 2004. Managing Basic Education: Developing Local Government Capacity (An Introduction to the Program). Bulletin. May.
- Sylva, K., & Siraj-Blatchford, I. 1995. Bridging the gap between home and school: improving achievement in primary schools. Paris: UNESCO.
- UNICEF-UNESCO. 2000. CLCC—Creating Learning Community for Children: Improving Primary Schools through School-Based Management and Community Participation (A Joint UNESCO-UNICEF-GOI Pilot Project: Evaluation Report). Nov-Dec.
- World Bank. 2000. Implementation Completion Report on Indonesia Primary Education Quality Improvement Project. Loan 3448-IND. Report No. 20435-IND. 20 April.